

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR
1883 K/Pdt/2006 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA PADA PT BANK CIMB NIAGA TBK
CABANG PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

**SYAFRIDA HAYATI
NIM. 10927006427**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

ABSTRAK

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, khususnya dalam membantu usaha kecil dan menengah. Selain itu, fidusia memiliki keuntungan tersendiri bagi debitur karena masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari, sedangkan dilain pihak prosedur pengikatan fidusia lebih praktis digunakan oleh pihak kreditur. Dalam kasus jaminan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan nasabahnya yaitu Rudy Wendy Susanto sebagai Direktur CV. Selecta Tirta Riau yang diproses pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilanjutkan ke tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Riau hingga sampai ketingkat kasasi pada Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim tidak memberikan putusan membatalkan eksekusi jaminan yang tidak disebutkan dalam perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/006 tanggal 08 Mei 2002. Hakim memberikan Putusan memberikan sita Jaminan terhadap Jaminan Fidusia yang merupakan Jaminan yang diikat dengan Perjanjian Kredit yang berbeda dengan Perjanjian Pokok, Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah yang tertuang pada Akta Fidusia Nomor 106 tanggal 15 Oktober 2002 yang terhadap Jaminan Fidusia tersebut tetap dijatuhkan eksekusi meskipun belum jatuh tempo dan Hakim berpendapat bahwa debitur dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penulisan penelitian dengan masalah pokok yaitu pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan fidusia melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 terhadap debitur pemberi fidusia pada PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang pada prinsipnya tetap memperkuat keputusan Hakim Judex Factie yaitu pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau. Pertimbangan Hakim tersebut adalah berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diungkapkan oleh para pihak dalam perkara tersebut. Sedangkan akibat hukum dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/2006 adalah dengan terbuktinya pihak debitur sebagai pihak yang cidera janji (wanprestasi) maka setelah Putusan Pengadilan dijatuhkan, objek jaminan dapat segera dieksekusi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam untuk sang suri teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa mengantarkan umat manusia menuju keridhaan Allah SWT.

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1883/K/Pdt/2006 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK CIMB NIAGA TBK CABANG PEKANBARU". Di Latar belakang oleh adanya sengketa eksekusi antara jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian skripsi ini.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis harapkan agar materi Skripsi ini dapat disempurnakan melalui penelitian lanjutan oleh angkatan selanjutnya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ayahanda Lukman dan ibunda Nurhayani, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan kesabaran serta dukungan yang sangat berharga sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd beserta jajaran yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Lysa Angrayni, SH. MH sebagai pembimbing yang telah memberikan nasehat, masukan, arahan beserta saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH. MH dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Maghfirah, MA.
6. Teman-teman seperjuangan, Wiwi Martalisa, Inawaroh, Zia, Nay, dan seluruh rekan Mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2009 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 16 September 2013

Syafrida Hayati
NIM.10927006427

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN.....	14
A. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan.....	14
B. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan.....	18
C. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	23
D. Pengaturan Hukum Jaminan dan Sistem Hukum Jaminan.....	24
E. Sumber Hukum Jaminan	26
F. Macam-Macam Jaminan.....	31
G. Sifat Perjanjian Jaminan.....	34
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA	36
A. Pengertian Jaminan Fidusia.....	36
B. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	38

C. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia.....	40
D. Pembebanan Jaminan Fidusia	47
E. Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Fidusia Ulang.....	49
F. Eksekusi Jaminan Fidusia	53
G. Perbedaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	56
BAB IV : HASIL PENELITIAN	59
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006.....	59
B. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 Terhadap Debitur Pemberi Fidusia pada Bank CIMB NIaga Tbk Cabang Pekanbaru	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN	14
A. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan	14
B. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan	18
C. Asas-Asas Hukum Jaminan	22
D. Pengaturan Hukum Jaminan dan Sistem Hukum Jaminan	24
E. Sumber Hukum Jaminan	25
F. Macam-Macam Jaminan	30
G. Sifat Perjanjian Jaminan	33
BAB III : TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA	36
A. Pengertian Jaminan Fidusia	36
B. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	37

C.	Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	38
D.	Pembebanan Jaminan Fidusia	45
E.	Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Fidusia Ulang	48
F.	Eksekusi Jaminan Fidusia	51
G.	Perbedaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Eksekusi Jaminan Fidusia	53
BAB IV : HASIL PENELITIAN		59
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006.....	57
B.	Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 Terhadap Debitur Pemberi Fidusia pada Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru.....	69
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang minta perhatian serius dalam pembinaan di antaranya adalah bidang hukum jaminan.¹ Hukum Jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Dibidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.²

Perkreditan memberikan dukungan kepada ekonomi lemah dan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi perbankan, setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit di samping unsur keseimbangan dan keuntungan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.

Salah satu jenis jaminan kebendajaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2007), Cet. Ke-4. Bina, h. 1

² H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung : Alumni, 2004), h. 1

didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.³

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdracht (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *Zekerheids eigendom* artinya hak milik sebagai kepercayaan.

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁴

Menurut Mahadi "*fidusia*" berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga ada kata "*fido*" yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.⁵ Subekti menjelaskan arti kata "*fiduciair*" adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa

³ Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, sebelumnya diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 dan UU No. 4 Tahun 1992.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 119

⁵ Mahadi, *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta : Proyek BPHN: 1981), h.61.

yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.⁶

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijumpai, pengertian fidusia yaitu:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi fidusia itu merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridis levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), barangnya tetap dikuasai oleh debitur.

Menurut Munir Fuady ada beberapa hal yang mendasari lahirnya jaminan fidusia, antara lain:

1. Dalam praktek terdapat kasus dimana benda yang menjadi objek jaminan utang adalah tergolong benda bergerak tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada kreditur, sementara kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika benda tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu dibutuhkan suatu bentuk jaminan utang yang objeknya benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda itu kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

⁶ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1982), h. 76

2. Adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan, misalnya hak pakai atas tanah. Sehingga hak pakai atas tanah tersebut diikat dengan jaminan fidusia.
3. Ada benda-benda yang sebenarnya termasuk benda-benda bergerak tetapi mempunyai sifat-sifat seperti benda tidak bergerak sehingga pengikatannya dengan gadai dirasa tidak cukup, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari jaminan tersebut. Karena itu jaminan fidusia menjadi pilihan.
4. Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak atas benda yang sebenarnya tidak bergerak tetapi tidak dapat diikat dengan hipotik.
5. Adakalanya pihak kreditur dan debitur tidak keberatan agar diikat jaminan utang berupa gadai, tetapi benda yang dijamin karena sesuatu hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada kreditur, misalnya saham yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itu timbul fidusia saham”.⁷

Dengan adanya berbagai kelemahan di atas, dalam praktik timbul lembaga baru yaitu fidusia. Selain fakta di atas yang melatar belakangi lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan keadaan sekarang, tercantum dalam konsiderannya yaitu:

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus mengikat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Pengaturan lembaga jaminan fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi.
3. Dalam rangka memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Di Indonesia, kasus jaminan fidusia untuk pertama kali diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dalam perkara *Bataafsche Petroleum Maatschappij(BPM) v. Pedro Clignett* tanggal 18 Agustus 1932 dengan objek

⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 2-3

fidusia adalah benda bergerak.⁸*Hooggerechtschof* dengan arrestnya tanggal 16 Februari 1933 menetapkan bahwa hak *grant* (*grant recht*) dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Dalam bidang perundang-undangan, perkembangan objek fidusia dapat dilihat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek jaminan dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Jadi dapat diketahui bahwa benda-benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. “Benda tidak bergerak” yang dimaksudkan ialah bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yaitu bangunan di atas tanah hak milik orang lain.

Fidusia memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah sangat membantu usaha debitur. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Debitur

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 2010), h.150.

⁹ Lihat Pasal 25, 39, dan Pasal 33 UU No. 5 Tahun 1960.

masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari, pihak perbankan lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 (UU Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan) Pasal 8 dan penjelasannya dinyatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung resiko. Salah satu cara mengatasi resiko adalah menetapkan jaminan (*collateral*) dalam analisis pemberian kredit.

Jaminan yang diminta bank dapat berupa jaminan pokok berupa barang proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan, piutang dagang/hak tagih, dan lain-lain) sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan debitur. Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut di atas. Sebagai contoh: aktiva tetap diluar proyek yang dibiayai, surat berharga, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

Hukum jaminan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung prinsip bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan utang untuk segala perikatan yang dibuat.¹⁰ Untuk menutupi kelemahan itu, perlu diperjanjikan secara khusus benda-benda tertentu dari debitur yang diikat sebagai jaminan utang. Secara teoritis, jika seorang pemberi fidusia wanprestasi, objek jaminan fidusia dapat dieksekusi, kalau harga jual melebihi utang debitur, kreditur fidusia wajib mengembalikan kelebihan uang sisa penjualan kepada debiturnya. Sebaliknya apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk membayar utang, debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utang tersebut.¹¹ Eksekusi hak tanggungan diatur dalam pasal 20 sampai 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹⁰Prinsip Hukum Jaminan tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹Lihat Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999.

1996. Latar belakang lahirnya eksekusi ini adalah disebabkan pemberi hak tanggungan atau debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek fidusia, mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹³

Menurut pihak bank, apabila ternyata obyek jaminan fidusia tidak mencukupi untuk membayar utang, bank dapat menyita barang-barang lain milik debitur. Selain jaminan fidusia bank meminta jaminan lainnya yang diikat dengan surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual atas hak tanggungan, hak milik atau jaminan yang bersifat perorangan.

Dalam kasus jaminan PT Bank CIMB Niaga Tbk¹⁴ dengan nasabahnya yaitu Rudy Wendy Susanto sebagai Direktur CV. Selecta Tirta Riau yang diproses pada pengadilan negeri Pekanbaru yang dilanjutkan ke tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Riau hingga sampai ketingkat kasasipada Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim tidak memberikan putusan membatalkan eksekusi jaminan yang tidak disebutkan dalam perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/006 tanggal 08 Mei 2002. Hakim memberikan Putusan memberikan sita Jaminan terhadap Jaminan Fidusia yang merupakan Jaminan yang diikat dengan Perjanjian Kredit yang berbeda dengan

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta :PT Rajawali Pers, 2008), h.190.

¹³ *Ibid.*, h.89.

¹⁴ CIMB Group Holdings Berhad, mengakuisisi saham Bank Niaga pada tahun 2002, pada Tahun 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group. Pada bulan Mei 2008, Bank Niaga resmi berubah nama menjadi Bank CIMB Niaga.

Perjanjian Pokok. Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah yang tertuang pada Akta Fidusia Nomor 106 tanggal 15 Oktober 2002 yang terhadap Jaminan Fidusia tersebut tetap dijatuhkan eksekusi meskipun belum jatuh tempo. Hakim berpendapat bahwa debitur dinyatakan wanprestasi, sita tidak dapat dibatalkan dengan alasan tidak sah dan melawan hukum. Pendapat penulis seharusnya yang boleh diminta pertanggungjawaban hanya sebatas benda jaminan yang disebutkan dalam perjanjian pokok dengan alasan bahwa ketika membuat perjanjian kredit, pihak bank sudah menaksir bahwa benda agunan lebih tinggi nilainya dari jumlah pinjaman yang diberikan. Disamping itu, pembebanan jaminan fidusia merupakan jaminan yang terpisah dengan perjanjian penjaminan lainnya seperti jaminan atas hak tanggungan sebagaimana kasus dalam putusan No. 1883 K/Pdt/2006 yang memberikan sita gabungan dari obyek penjaminan yaitu dua buah jaminan atas hak tanggungan dan satu jaminan fidusia milik nasabah bank CIMB Niaga. Hal tersebut merupakan suatu fenomena hukum yang janggal dimana hakim meletakkan sita gabungan atas dua obyek jaminan yang berbeda sekaligus.

Secara teori jaminan tambahan lebih dahulu dieksekusi, jika belum cukup untuk membayar utang debitur dapatlah dilakukan eksekusi terhadap jaminan pokok, dalam proses eksekusi penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang wajar, sehingga debitur tidak dirugikan.

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Apabila debitur wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan. Dalam praktik

ada kecendrungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh bank, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penulisan penelitian skripsi dengan judul **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1883/K/Pdt/2006 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT BANK CIMB NIAGA TBK CABANG PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan penelitian, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/2006 dalam penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia serta akibat hukum terhadap debitur pemberi fidusia pada PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan fidusia melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 terhadap debitur pemberi fidusia pada PT Bank CIMB NiagaTbk cabang Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan fidusia melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 terhadap debitur pemberi fidusia pada PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi perkembangan di bidang ilmu hukum khususnya berkaitan dengan hukum jaminan.
2. Secara praktis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam menjawab berbagai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masalah hukum jaminan fidusia.
 - b. Sebagai sarana untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁵ Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.

2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berkas putusan Mahkamah Agung Nomor 1883/K/Pdt/2006, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1883/K/Pdt/2006.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa, jurnal hukum, literatur hukum, berbagai hasil pertemuan ilmiah baik ditingkat

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007), Cet. 3 h.257.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.3,(Jakarta : kencana persada media group), h. 41.

nasional maupun internasional, serta tulisan-tulisan hukum dalam website internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Analisis Data

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, maupun hasil penelitian lainnya dilakukan secara deskriptif, analisis, evaluatif interpretatif, yaitu menganalisis, menafsirkan, menilaidan menjelaskan prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan fidusia sebagai jaminan dalam kredit perbankan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN

Pada bab ini diuraikan tentang istilah dan pengertian hukum jaminan, objek dan ruang lingkup hukum jaminan, asas-asas hukum jaminan, pengaturan hukum jaminan dan sistem hukum jaminan, sumber hukum jaminan, macam-macam jaminan, sifat perjanjian jaminan.

BAB III :TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertianjaminan fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, asas-asas hukum jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dan fidusia ulang, eksekusi jaminan fidusia, perbedaan eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa eksekusi jaminan fidusia melalui putusan Nomor 1883 K/Pdt/2006 dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 terhadap debitur pemberi fidusia pada PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN

A. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1997, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Defenisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:¹

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan tersebut merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.”

¹Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Op. Cit.* h. 8

Defenisi terakhir ini difokuskan semata-mata pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan. Dari berbagai kelemahan defenisi tersebut maka ketiga defenisi di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan, bahwa hukum jaminan adalah:

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”

Unsur- unsur yang tercantum dalam defenisi ini adalah:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberian dan penerima jaminan

Pemberian jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak

sebagai sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.² Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata, “jamin” yang berarti,

² Salim HS, *Op.Cit.*, h. 21.

“tanggung”, sehingga jamin dapat diartikan sebagai tanggungan.³Selain istilah jaminan dikenal juga dengan istilah agunan, dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan agunan adalah“jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan itu. Namun demikian, dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut.

Ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa, “segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”.

Ketentuan Pasal 1132 menyatakan bahwa, “kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain.”⁵

B. Objek Dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi 2 macam, yaitu objek materiil dan formal. Objek

³Abdul R.Saliman, *Op.Cit.*, h. 19.

⁴Salim HS, *Loc.Cit.*

⁵Abdul R.Saliman, *Op.Cit.*, h. 19-20.

materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek formal yaitu, sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat didalam pembebanan jaminan.⁶

Dalam hukum positif Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi (isi) peraturan perundan-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antar lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang dan sebagainya. Beberapa ketentuan terdapat dalam KUH Perdata dan KUH Dagang menagtur sepenuhnya atau berkaitan dengan penjaminan utang.⁷

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus.⁸Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya. Artinya, benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak untuk diperuntukkan untuk kreditur, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Para kreditur itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur demikian disebut kreditur konkuren,

⁶ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 8.

⁷M. Bahsan, *Op.Cit.*, h. 8.

⁸Salim HS, *Loc.Cit.*

lawannya ialah kreditur preferen. Para kreditur konkuren dalam pemenuhan piutangnya dikalahkan dari para kreditur preferen (pemegang hipotek, gadai, dan privilege), sedangkan diantara para kreditur preferen sendiri para pemegang hipotek dan gadai diutamakan dari pemegang privilege.

Jaminan umum timbul dari Undang-Undang, tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang itu (Pasal 1131, Pasal 1132 KUH Perdata). Ditinjau dari sudut sifat haknya para kreditur konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

Walaupun telah ada ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, namun ketentuan tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu menjadi bagi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur.

Jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian penjaminan uang) tidak memuaskan bagi kreditur kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kreditur yang diberikan. Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan kata lain memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan.

Dalam praktek perbankan adanya jaminan yang dikhususkan diisyaratkan oleh suatu prinsip sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Perbankan yaitu ketentuan Pasal 24 Undang-Undang no. 14 tahun 1967 yang melarang adanya pemberian kredit tanpa jaminan. Jadi jaminan disini maksudnya adalah jaminan yang dikhususkan untuk Bank di mana di pertelaan barang-barang jaminan itu disebutkan secara terperinci.

Jaminan yang dimaksud oleh Pasal 24 Undang-Undang Pokok Perbankan tersebut harus diartikan jaminan dalam arti luas, yaitu tidak hanya jaminan dalam arti materiil tetapi juga immateriil yaitu mengenai watak dari debitur, kemampuan ekonominya, jalannya perusahaan, keadaan administrasinya dan lain-lain. Dimana hal-hal demikian ikut dinilai menjadi perkembangan dan jaminan dalam menentukan kredit yang akan diberikan.

Disamping itu dalam praktek perbankan juga berlaku prinsip *Commanditeringsverbod*. Yaitu adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit tersebut bank ikut menanggung resiko dari usaha debitur.

Adapun jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.⁹

⁹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 44-46.

Hukum Perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat di peralihkan (contoh hipotik, gadai dan lain-lain).

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.¹⁰

Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia saat ini adalah penggolongan atas benda bergerak dan tak bergerak. Karenanya juga di kenal adanya pembedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Pembedaan atas benda bergerak dan tak bergerak, juga pembedaan atas jaminan benda bergerak dan tak bergerak demikian itu dikenal hampir diseluruh perundang-undangan modern di berbagai negara didunia ini.

Menurut sistem hukum perdata perbedaan atas benda bergerak dan tak bergerak itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan (jaminan).

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-6, h.112.

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Dimana atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana dapat di pasang untuk kredit yang akan diberikan.

Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka sebagai lembaga jaminan dapat di pasang hipotik atau *credietverband*.¹¹

C. Asas-asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisa terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut ini.

- a. Asas *publicited*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga tidak dapat mengetahui benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran Hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu Syahbandar.

¹¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 49.

- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas tak dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan harus bersumber dari Pancasila sebagai asas idiil (filosofis), UUD 1945 sebagai asas konstitusional (struktural), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai asas konsepsional (politis) dan undang-undang sebagai asas operasional (teknis). Asas operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas asesi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.¹²

Untuk tiap-tiap asas-asas hukum tersebut, dapat dilihat pada hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, dan hipotek kapal laut.

¹²H. Tan Kamelo, *Op.Cit.*, h. 19.

D. Pengaturan Hukum Jaminan Dan Sistem Hukum Jaminan

Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu (1) di dalam Buku II KUH Perdata dan (2) di luar Buku II KUH Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan hukum jaminan, yang masih berlaku dalam KUH Perdata, adalah gadai (pasal 1150 KUH Perdata sampai pasal 1161 KUH Perdata) dan Hipotek (pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan pasal 1132 KUH Perdata). Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tentang hipotek ini meliputi: (1) ketentuan-ketentuan umum, (2) pembukuan-pembukuan hipotek serta bentuk caranya pembukuan, (3) pencoretan pembukuan, (4) akibat-akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai benda yang tidak dibebani, (5) hapusnya hipotek, dan (6) pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka, dan publikasi register umum.

Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUH Perdata merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar di luar KUH Perdata, ketentuan-ketentuan hukum itu, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- 5) Buku III tentang *van Zaaken* (hukum benda) NBW Belanda.

Pembebanan hipotek hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan hipotek atas kapal laut yang beratnya 20 m³ ke atas dan pesawat udara masih berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam KUH Perdata.¹³

Sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) sistem tertutup (*closed system*) dan (2) sistem terbuka (*open system*). Sistem pengaturan hukum jaminan adalah sistem tertutup (*closed system*). Yang diartikan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya didalam KUH Perdata maupun yang tidak tercantum didalam KUH Perdata, seperti jual beli sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberian kuasa. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian nominaat, yaitu dikenal dan diatur di dalam KUH Perdata, seperti leasing, beli sewa, kontrak rahim, *franchise*, dan lainnya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi dikenal di dalam praktik.

E. Sumber Hukum Jaminan

Sumber hukum mengandung banyak pengertian. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan

¹³ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 11-12.

dalam memutus perkara. Ada juga yang memberi arti sumber hukum itu sebagai tempat asalnya hukum.

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Menurut Moch Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bagi seorang sarjana hukum yang penting adalah sumber hukum yang formal, terutama yang berbentuk tertulis.

1. Buku II KUH Perdata (BW)

Dalam KUH Perdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan.¹⁴ Jaminan- jaminan yang masih berlaku dalam Buku II KUH Perdata hanyalah gadai (*pand*) dan hipotek kapal laut, sedangkan hipotek atas tanah tidak berlaku lagi karena telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini diatur tentang:

1. Pengertian gadai (Pasal 1150)
2. Bentuk perjanjian gadai (Pasal 1151)
3. Hak-hak para pihak (Pasal 1152 – 1153)
4. Kewajiban para pihak (Pasal 1154 –1155)
5. Wanprestasi (Pasal 1156)
6. Tanggung jawab para pihak (Pasal 1157)
7. Bunga (Pasal 1158)
8. Debitur tidak berhak untuk menuntut kembali baranggadai, sebelum dilunasi seluruhnya (Pasal 1159) dan

¹⁴M. Bahsan, *Op.Cit.*, h. 9.

9. Tidak dapat dibagi-bagi barang gadai (Pasal 1160).

Sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata. Didalam berbagai ketentuan ini diatur tentang;

1. Ketentuan-ketentuan umum (Pasal 1162 – 1178)
2. Pendaftaran Hipotik dan bentuk pendaftaran (Pasal 1179 – 1194)
3. Pencoretan pendaftaran (Pasal 1195 – 1197)
4. Akibat Hipotik terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (Pasal 1198 –1208)
5. Hapusnya hipotik (Pasal 1209-1220)
6. Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotik,tanggung jawab mereka dalam hal diketahuinya daftar-daftaroleh masyarakat (Pasal 1221-1232).

Ketentuan tentang hipotek atas tanah kini sudah tidak berlaku lagi karena telah di ganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak dan Tanggungan, sedangkan ketentuan yang masih berlaku, hanya ketentuan-ketentuan yang beratnya 20 m3 ke atas.¹⁵

2. KUH Dagang

KUH Dagang diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23. Dagang terdiri atas 2 buku, yaitu Buku I tentang Dagang pada umumnya dan Buku II tentang Hak-hak dan Kewajiban yang Timbul dalam Pelayaran. Sedangkan jumlah pasalnya, sebanyak 754 Pasal. Pasal- pasal yang erat kaitan dengan jaminan adalah pasal-

¹⁵Salim HS, *Op.Cit.*, h. 15-16.

pasal yang mengatur hipotek kapal laut. Pasal-pasal yang mengatur hipotek kapal laut adalah Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUH Dagang.¹⁶

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan jaminan adalah Pasal 51 dan Pasal 57 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam pasal 57 UUPA berbunyi” Selama Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai *hypotheek* tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan *credietverband* tersebut dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S. 1937-190.¹⁷

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka hipotek yang diatur oleh KUH Perdata dan *credietverband* yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang, untuk selanjutnya tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang.¹⁸ Tujuan pencabutan ketentuan dalam KUH Perdata dan *credietverband* adalah karena tidak

¹⁶M. Bahsan, *Op.Cit.*, h. 15.

¹⁷Salim HS, *Op.Cit.*, h. 16-17.

¹⁸M. Bahsan, *Op.Cit.*, h. 22.

sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia.¹⁹

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu :

- 1) Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- 2) Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁰

¹⁹Salim HS, *Loc.Cit.*

²⁰Salim HS, *Op.Cit.*, h. 126-127.

6. Ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran berbunyi:

- 1) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani dengan Hipotik.
- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjabaran pasal ini belum ada, namun didalam penjelasan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pembebasan hipotik. Sedangkan pelaksanaan pembebanan hipotik atas kapal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.²¹

F. Macam-Macam Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi:

- a. Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena Undang-Undang dan perjanjian.
- b. Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan bersifat perorangan.
- c. Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.

²¹ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 18.

- d. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.²²

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.”²³Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.²⁴ Dengan perkataan lain, jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur).²⁵

Jaminan perorangan memberikan hak *verhaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
3. Perjanjian garansi.²⁶

²²Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 192.

²³Salim HS, *Op.Cit.*, h. 23.

²⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.74.

²⁵Abdul R.Saliman, *Op.Cit.*, h. 21.

²⁶Titik Triwulan Tutik, *Loc.Cit.*

b. Jaminan Kebendaan (Jaminan Materiil)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentudan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.²⁷

Jaminan hak kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.²⁸

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

- a. Hak mutlak atas suatu benda.
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
- d. Selalu mengikuti bendanya.
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lain.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu:

1. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata.
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku KUH Perdata.
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937.
4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996.

²⁷Salim HS, *Loc.Cit.*

²⁸Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, h. 193.

5. Jaminan fidusia, sebagaimana diatur didalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah:

1. Gadai.
2. Hak tanggungan.
3. Jaminan fidusia.
4. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara.
5. *Borg*.
6. Tanggung-menanggung.
7. Perjanjian garansi.

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan *credietverband* sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan pembebanan atas kapal laut dan pesawat udara masih tetap menggunakan lembaga hipotek.²⁹

G. Sifat Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian *accessoir* dan perjanjian pokok. Perjanjian jaminan adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesoir (*accessoir*), yaitu perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok atau juga dikatakan perjanjian tambahan. Perjanjian jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi bergantung pada perjanjian

²⁹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.105.

pokoknya³⁰. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelfstanding een redder van bestaan recht*).³¹ Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan). Unsur-unsur kredit, meliputi:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
2. Didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
3. Para pihaknya, yaitu bank dan pihak lain (nasabah);
4. Kewajiban peminjam, yaitu untuk melunasi hutangnya;
5. Jangka waktu; dan adanya bunga.

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.³²

³⁰Trisadini Prasastinah Usanti, *Piutang dalam Perspektif Hukum Jaminan*, diakses dari <http://aditris.files.wordpress.com/2011/12/jurnal-piutang-dalam-perspektif-hukum-jaminanfidusia2.doc> pada tanggal 12 September 2013.

³¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.114.

³²Salim HS, *Op.Cit.*, h. 24-29.

BAB III

TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN FIDUSIA

A. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan.¹ Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.²

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom ooverdract(FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Menurut Mahadi “*fidusia*” berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga ada kata “*fido*” yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.³ Subekti menjelaskan arti kata “*fiduciair*” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa

¹H. Tan Kamelo, *Op.Cit.*, h. 35

²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Loc.Cit.*

³ Mahadi, *Loc.Cit.*

yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.⁴

Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang menagrtikan fidusia adalah “suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur –*eigenaar*.⁵

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁶

Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu:

- Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.
- Dilakukan atas dasar kepercayaan.
- Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

⁴ R. Subekti, *Loc. Cit.*

⁵ Salim HS, *Op.Ci.*, h. 56.

⁶ *Ibid*, h. 55.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 283-284

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- Adanya hak jaminan
- Adanya objek, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun
- Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
- Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

B. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.⁸

Dengan lahir Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 butir 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah Benda apa pun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya⁹, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek

⁸ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 57-64.

⁹ Sobirin, *Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, diakses dari [http:// eprints. undip. ac.id/ 18238/1/SOBIRIN.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18238/1/SOBIRIN.pdf) pada tanggal 12 September 2013.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Dagang jjs pasal 1162 dst. Kitab Undang-Undang Perdata.¹⁰

Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang
- d. Gadai.¹¹

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹²

C. Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam suatu undang-undang. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai asas-asas hukum jaminan fidusia, perlu dijelaskan pengertian asas. Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa

¹⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 141.

¹¹Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 287.

¹²Salim HS, *Loc.Cit.*

latin “*principium*” bahasa Inggris “*principle*” dan bahasa Belanda “*beginsel*”, yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.

Kata “*principle*” atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Pengertian asas dalam hukum yang lebih memuaskan dikemukakan oleh para ahli hukum antara lain “*A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law*”. Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak. Kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum.

Asas hukum bukanlah suatu perintah hukum yang konkrit yang dapat dipergunakan terhadap peristiwa konkrit dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada dalam norma hukum yang konkrit seperti peraturan yang sudah dituangkan dalam wujud pasal-pasal perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan dapat ditemukan aturan yang mendasar berupa asas hukum yang merupakan cita-cita dari pembentukannya. Asas hukum diperoleh dari proses analisis (konstruksi yuridis) yaitu dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkrit, untuk memperoleh sifat-sifat yang abstrak.¹³

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk Undang-Undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan

¹³Yudhian Amada, *Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek Jaminan*, diakses dari <http://eprints.upnjatim.ac.id/2973/1/file1.pdf> pada 03 Juli 2013.

teori dari asas hukum tersebut diatas, maka asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Asas-asas hukum jaminan fidusia adalah:

Pertama, asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kedua, asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum ini disebut “*droit de suite atau zaaksgevolg*”. Pengertian *droit de suit* dijelaskan sebagai *the right of a creditor to pursue debtors property into the hands of third persons for the enforcement of his claim*.

Pengakuan asas ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut.

Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil

penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga.

Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Karena itu, konsekuensi yuridis adalah pemberlakuan *asas droit de suite* baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maksud penegasan ini tidak lain adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.

Ketiga, asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan fidusia.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Sesuai dengan sifat asesor ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Dengan demikian, perjanjian

jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang.

Asas assesoritas membawa konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditur pemegang jaminan fidusia baru. Hal ini berarti terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan fidusia baru. Pihak yang menerima peralihan hak jaminan fidusia mendaftarkan perbuatan hukum (*cessie*) tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada.

Jaminan atas hutang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu. Asas ini adalah untuk menampung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Kelima, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Pengaturan asas ini harus dilihat kaitannya dengan sumber hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Salah satu prinsip yang terkandung didalam pasal ini adalah bahwa benda yang akan ada milik debitur dapat dijadikan jaminan hutang. Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan

bahwa benda yang akan ada adalah benda yang pada saat dibuat perjanjian jaminan belum ada tetapi dikemudian hari benda tersebut ada. Benda yang akan dikemudian hari itu harus milik debitur.

Asas tersebut telah tertampung atau telah diakui setelah keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada. Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan saja menetapkan objek jaminan fidusia terhadap benda yang akan ada, bahkan memberi aturan terhadap piutang yang akan dan juga dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Apabila dipahami dengan cermat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sudah cukup jelas bahwa piutang itu tidak lain adalah benda yang tidak berwujud. Oleh karena itu, pengaturan piutang yang akan ada adalah norma yang mubazir atau berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menganut prinsip konsistensi internal dalam menyusun Pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Keenam, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain, dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisah horisontal. Dalam pemberian kredit bank, penegasan asas ini dapat menampung pihak pencari kredit khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi memiliki hak atas bangunan atau rumah. Biasanya hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa.

Ketujuh, asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fudisia yang

dimaksudkan adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan yang dimaksudkan adalah data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan. dalam ilmu hukum disebut asas spesialisitas pertelaan.

Kedelapan, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang berwenang berbuat. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas ini belum dicantumkan secara tegas. Hal ini berbeda dengan jaminan hak tanggungan yang secara tegas dicantumkan dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Kesembilan, asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi. Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.

Kesepuluh, asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Dalam ilmu hukum diatas asas pendakuan.

Kesebelas, asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia dari pada kreditur yang mendaftarkan kemudian.

Keduabelas, asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. Asas itikad yang baik memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan kepada pihak lain.

Ketigabelas, asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada sertifikat jaminan fidusia, dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan hal penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan.¹⁴

D. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia).¹⁵ Ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa pembebanan Jaminan Fidusia dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat: (1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, (2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, (3) uraian

¹⁴H. Tan Kamelo, *Op.Cit.*, h. 159-171.

¹⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 142.

mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (4) nilai penjaminan, dan (5) nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁶

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur mengenai hipotek, dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka akta jaminan Fidusia juga harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Jaminan fidusia menetapkan perjanjian Fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek Jaminan Fidusia.¹⁷

Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

¹⁶Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 289.

¹⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 143.

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemungkinan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.

Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan, bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh dikemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian mana tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.¹⁸

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Bahkan 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak

¹⁸Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

menghapus klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.¹⁹

E. Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Fidusia Ulang

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tatacara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.²⁰

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.²¹

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 yang tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang tentang jaminan fidusia ditentukan bahwa benda baik yang berada didalam wilayah negara Republik Indonesia maupun berada diluar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.

¹⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 145.

²⁰ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 82.

²¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 146.

Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk pertamakalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk pada setiap Provinsi di Indonesia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.²² Tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia
- b. Melahirkan ikatan Jaminan fidusia bagi kreditur Penerima Fidusia
- c. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan
- d. Memenuhi asas publisitas.²³

Adapun permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

²²Salim HS, *Loc.Cit.*

²³Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 291.

- e. Nilai penjamin, dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.²⁴

Mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Karenanya Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.²⁵

2. Fidusia Ulang

Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun

²⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 147.

²⁵Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 292.

penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi Fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.²⁶

F. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada 4 cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim

²⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 150-151.

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan (pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).²⁷

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

²⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, h. 90.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum (Pasal 32)
2. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum (Pasal 33).²⁸

G. Perbedaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur cidera janji, obyek Hak Tanggungan oleh kreditur pemegang Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasil pelelangan tersebut untuk pelunasan piutangnya yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut, dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Inilah yang disebut eksekusi Hak Tanggungan.

Kreditur berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan, dengan hak mendahului daripada kreditur lain yang mempunyai peringkat yang lebih rendah atau yang bukan kreditur pemegang Hak Tanggungan. dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang

²⁸M. Bahsan, *Op.Cit.*, h. 67.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Jaminan*, (Bandung : PT Mandar Maju, 2009), h.102

tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan untuk memenuhi kewajibannya yang lain.

Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi adalah karena debitur (pemberi fidusia) cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diatur mengenai Lembaga Parate Eksekusi yaitu Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “.

Dengan demikian unsur-unsur esensi dalam pasal tersebut adalah :

1. Debitur cidera janji
2. Kreditur Pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak
3. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
4. Syarat penjualan melalui pelelangan umum
5. Hak Kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
6. Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

Hal lain yang perlu dikaji adalah ketentuan Pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji , antara lain janji bahwa pemegang hak tanggungan

pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.

Ketentuan ini sebenarnya tidak perlu lagi dicantumkan atau diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, karena secara hukum hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri telah diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama melalui ketentuan pasal 6.

Didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua pengaturan yang mengenai parate eksekusi yaitu ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan ketentuan Pasal 29 ayat 1 huruf b. Hal ini tidak sama dengan pengaturan parate eksekusi yang ada pada Undang-Undang Hak Tanggungan yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama dengan kekuasaannya sendiri untuk menjual benda yang menjadi objek hak tanggungan dan meletakkan dasar pelaksanaan eksekusinya pada Pasal 20 ayat 1 huruf a jadi hanya satu pasal saja.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia parate eksekusi bukan janji melainkan hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu merupakan janji dan juga *ex legi* (pemberian Undang-Undang).

Dalam Pasal 15 ayat 3 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri “ Dalam Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai cara melaksanakan eksekusi, hanya meletakkan hak bagi Kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ketentuan ini ditindak lanjuti oleh

pasal 29 ayat 1 sub b yang menyatakan bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Jadi perbedaan antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Hak Tanggungan adalah terletak pada unsur janji, yang mana dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pelaksanaan parate eksekusi itu harus dicantumkan secara jelas dan tegas mengenai janji yang berkenaan dengan pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji, dia tidak berdiri sendiri. sedangkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak didapat hal tersebut. Parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diperoleh atas pemberian Undang-Undang. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan juga parate eksekusi ini diperoleh atas pemberian undang-undang (*ex legi*), namun hal itu masih harus diikuti lagi dengan penegasan berlakunya penerapan dengan janji yang harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006

Perkara ini terjadi karena adanya kredit bermasalah antara Bank CIMB Niaga dan nasabahnya yaitu Rudy Wendy Susanto, Direktur CV. Selektia Tirta Riau. Kedua pihak terikat oleh adanya Perjanjian Kredit atas fasilitas pinjaman kredit. Perjanjian kredit dimaksud adalah Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/006 tanggal 08 Mei 2002 dengan pinjaman tetap (*Revolving Basis*) sebesar Rp. 700.000.000,- dan Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp. 300.000.000,- terhadap perjanjian tersebut telah diadakan Addendum I pada tanggal 15 Oktober 2002 dan Addendum II pada tanggal 26 Mei 2003. Berdasarkan Addendum II dimaksud masa jatuh tempo Perjanjian Kredit dengan pinjaman Tetap sebesar Rp. 700.000.000,- adalah pada tanggal 10 Mei 2004 dan Pinjaman Transaksi Khusus (*On Liquidation Basis*) sebesar Rp. 300.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2005. Sedangkan Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/023 tanggal 15 Oktober 2002 dengan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I sebesar Rp. 500.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2005.

Dalam transaksi kredit Pinjaman Tetap sebesar Rp.700.000.000,- sebagai jaminannya yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 354 atas nama Rudy Wendy Susanto yang terletak di Jl. Setia budi No. 111 Pekanbaru sesuai Grosse Akte Hak Tanggungan Nomor : 1958/2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan Nomor : 145/2003 tanggal 30 Januari 2003, sedangkan jaminan terhadap fasilitas Pinjaman

Transaksi Khusus sebesar Rp. 300.000.000,- adalah sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor : 106 tanggal 15 Oktober 2002 dan Jaminan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I sebesar Rp. 500.000.000,- adalah sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 105 tanggal 15 Oktober 2002 yang mana sebagai objek jaminan fidusia tersebut adalah seperangkat mesin-mesin alat produksi milik Pelawan.

Fasilitas kredit yang diperoleh oleh Rudy Wendy Susanto dari Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru digunakan sebagai modal dalam menjalankan kegiatan usaha, namun kegiatan usaha tersebut ternyata mengalami kemunduran disebabkan karena terjadi kesulitan ekonomi nasional termasuk di Riau, dan bahkan mengalami krisis, sehingga pihak debitur mengalami kesulitan untuk membayar utangnya sehingga terjadi kredit bermasalah.

Hal ini berdampak pada transaksi kredit antara Rudy Wendy Susanto dengan pihak Bank CIMB Niaga karena kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kemunduran usahanya, akan tetapi sebagai nasabah yang beritikad baik dan sangat kooperatif, Rudy Wendy Susanto telah berusaha menunjukkan itikad baik terhadap pihak Bank dengan cara tetap membayar angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kerja. Kemudian Rudy Wendy Susanto mengajukan permohonan kepada pihak Bank agar terhadap perjanjian kredit yang ada diadakan penjadwalan hutang kembali dengan jumlah sesuai dengan tingkat kemajuan usahanya / CV. Selecta Tirta Riau, dan diperhitungkan/diperbaharui besar angsuran secara terus-menerus.

Oleh karena adanya kredit bermasalah tersebut PT. Bank CIMB Niaga melalui Kuasa Hukumnya vide Surat Nomor : 28/AP-JN/VIII 2004 tanggal 3

Agustus 2004 mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru secara bersamaan dengan Grosse Akte Hak Tanggungan Nomor : 1958/2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan Nomor : 145/2003 tanggal 30 Januari 2003 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 354 atas nama Rudy Wendy Susanto yang terletak di Jl. Setiabudi No. 111 Pekanbaru dan permohonannya telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Penetapannya Nomor : 09/PDT/EK-GROSSE/2004/PN.PBR tanggal 19 Agustus 2004 meskipun masa jatuh tempo Perjanjian Kredit belum waktunya, yaitu khusus terhadap fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp. 300.000.000,- dan Pinjaman Transaksi Khusus I sebesar Rp. 500.000.000,-.

Sebelum Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan Penetapan Nomor : 09/PDT/EK-GROSSE/2004/PN.PBR tertanggal 19 Agustus 2004, dimana terhadap kewajiban dan tunggakan debitur, sebagai debitur yang beritikad baik debitur telah berupaya menempuh langkah-langkah penyelesaian yang sangat kooperatif dengan mengajukan penawaran sebagai berikut :

- Pelawan memohon kepada Terlawan bahwa Pelawan menyanggupi dan hanya mempunyai kemampuan untuk melunasi angsuran tunggakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari total tunggakan sebesar Rp. 297.534.207,- Apa yang Pelawan lakukan dalam penawaran ini berada dalam batas kemampuan, kepatutan dan kewajaran.
- Pelawan bersedia/menyanggupi memberikan laporan pembukuan kemajuan kegiatan usaha setiap minggu dan laporan pembukuan Pelawan bersedia diperiksa setiap saat oleh Terlawan.

- Pelawan memohon kepada Terlawan agar pembayaran hutang Pelawan dijadwalkan kembali yang jumlah/besarnya angsuran disesuaikan dengan tingkat kemajuan kegiatan usaha. Namun semua tawaran Pelawan yang diajukan tersebut tidak ditanggapi dan tidak diterima oleh Terlawan.

Bahwa menurut pemohon kasasi (dahulu pembeding / pelawan) dalam Permohonan yang diajukan Terlawan untuk Penetapan Eksekusi Nomor : 09/PDT/EK-GROSSE/2004/PN.PBR adalah Permohonan yang "kabur", karena tidak pasti jumlah hutang Pelawan yang sebenarnya dimana sementara ;

Dalam Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/006 tanggal 08 Mei 2002 sebesar :

- Pinjaman Tetap = Rp.700.000.000,-
- Pinjaman Transaksi Khusus I= Rp.500.000.000,-
- Pinjaman Transaksi Khusus (*On Liquidation Basis*) = Rp.300.000.000,-

Dalam Somasi Terlawan Nomor 43/AP-JN/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 sebesar :

- Pinjaman Tetap= Rp.700.000.000,-
- Pinjaman Transaksi Khusus I = Rp.365.940.211,-
- Pinjaman Transaksi Khusus (*On Liquidation Basis*) = Rp.188.382.879,-

Dalam Informasi Kewajiban Debitur yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru tertanggal 10 Mei 2004 sebesar :

- Pinjaman Tetap = Rp.700.000.000,-

- Pinjaman Transaksi Khusus I = Rp.365.940.211,-
- Pinjaman Transaksi Khusus (*On Liquidation Basis*) = Rp.204.221.154,-

Sehingga atas ketidak pastian jumlah hutang Pelawan, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan Permohonan Eksekusi Terlawan adalah "Kabur" dan karenanya harus dikesampingkan.

Menurut Pelawan, tindakan Terlawan yang telah mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya terhadap Jaminan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp. 300.000.000,- sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 106, tanggal 15 Oktober 2002 dan terhadap Jaminan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I (*On Liquidation Basis*) sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 105, tanggal 15 Oktober 2002, jelas dan nyata-nyata merugikan Pelawan, sebab selain pembayaran/pelunasan fasilitas kredit dimaksud belum jatuh tempo dan juga prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia tidak sama dan tidak mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial sebagaimana halnya Grosse Akta Hak Tanggungan; sehingga menurut hukum, Penetapan Eksekusi Grosse Akta Hak Tanggungan, yaitu Penetapan Nomor : 09/PDT/EK-GROSSE/2004/PN.PBR, tanggal 19 Agustus 2004 adalah Cacat Hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk membatalkannya dan atau setidaknya tidaknya tidak meneruskan pelaksanaan Eksekusinya.

**1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:
05/PDT.G/2005/PN.PBR**

Berdasarkan dalil-dalil pada perkara yang diungkapkan oleh pihak-pihak dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama maka Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/PDT.G/2005/PN.PBR, tanggal 13 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONPENSI TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan perlawanan dari pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp 109.000-
(seratussembilan ribu rupiah) ;

**2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau Nomor:
111/PDT/2005/PT.R**

Pada pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Riau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menguatkan putusan hakim sebelumnya yaitu dengan Putusan No. 111/PDT/2005/PT.R tanggal 28 Februari 2006.

1. Bahwa pertimbangan hakim Judec Factie Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama didalam mengambil putusan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Riau akan mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan sendiri didalam memutrus perkara ini maka oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 13 Juni 2005 No. 05/PDT/G/2005/PN.PBR dapat dikuatkan.

2. Bahwa Judec Factie Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara in casu yang menyatakan:

- Bahwa terlawan mendalilkan bahwa dalam Perjanjian Kredit antara Pelawan dan terlawan terdapat klausula terhadap kelalaian pelawan dalam membayar hutangnya sesuai yang diperjanjikan.
- Bahwa berdasarkan pasal 12 Surat Perjanjian Kredit (Bukti P5-P8/TI-T4) ada suatu klausula terhadap kelalaian yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
- Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan 1.1 (maksudnya jangka waktu), baik karena hutang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya lainnya yang tertuang berdasarkan perjanjian, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya tanpa perlu surat teguran dalam hal terjadi kejadian sebagaimana disebut dalam Pasal 12 angka 1,2,3,4 s/d angka 1.1. yang antara lain berbunyi:
 1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, dimana lewat waktu saja sudah cukup dan sah bahwa peminjam telah melalaikan kewajiban.
 2. Bilamana menurut Bank, peminjam tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah

satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini.

3. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan bonafitas dan solvabilitas peminjam mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan peminjam tidak dapat membayar hutangnya lagi.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 tersebut diatas walaupun hutang pelawan kepada terlawan yang tertuang dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Kredit tersebut (sebagaimana bukti P5-P8/TI-T4) telah memberikan kewenangan kepada terlawan untuk menyatakan kredit pelawan dalam keadaan macet dan dapat ditagih atau jaminan dapat ditarik.

Bahwa pertimbangan hukum yang sedemikian rupa tersebut diatas jelas dan nyata bertentangan dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Surat Perjanjian Kredit antara pelawan dan terlawan bukanlah merupakan Surat Perjanjian Kredit yang berkekuatan eksekutorial *Acta Notariel* akan tetapi hanya berupa Akta dibawah tangan yang bermaterai cukup yang dibuat pada tanggal 8 Mei 2002 dengan Nomor: 047/COMM/006.

3. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor: 1883K/Pdt/2006

Pada tanggal 26 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt/G/2005/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru,

permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2006.

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Tentang Eksekusi Hak Tanggungan I maupun Tanggungan II yakni atas Akta Hak Tanggungan Nomor :1958/2002, tanggal 15 Oktober 2002 dan Akta Hak Tanggungan Nomor :145/2003, tanggal 30 Januari 2003, sebab terhadap kedua Akta Hak Tanggungan tersebut hanya dijamin kepada (1) satu Helai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 354, atas nama RUDY WENDY SUSANTO, yang terletak di Jl. Setia Budi Nomor : 111 Pekanbaru serta disamping adanya kedua Hak Tanggungan tersebut, pelawan juga masih memberikan/menambah Jaminan Kredit Pelawan yakni secara Fidusia atas Mesin dan peralatan produksi yang terletak di Jl. Setia Budi No. 111 Pekanbaru sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor : 106 tanggal 16 Oktober 2002 dan kepada keseluruhan Jaminan-jaminan Pelawan tersebut diatas Pelawan telah menerima Fasilitas-fasilitas Kredit dari Pelawan yakni Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) plafon awal sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2004 akan tetapi khusus kepada penerimaan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dengan plafon awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) baru akan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2005, sedangkan kepada penerimaan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 1 (PTK I) dengan plafon awal sebesar Rp.500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) baru akan jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2005 ; sehingga dengan demikian adalah tidak berdasarkan hukum jika dilakukan Eksekusi sesuai aturan Eksekusi Hak Tanggungan kepada kedua Hak Tanggungan yang diberikan

Pelawan kepada Terlawan sebab masih ada 2 (dua) lagi Fasilitas Pinjaman Kredit Pelawanyang belum jatuh tempo dan/atau belum berakhir waktunya dan/atau dengan perkataan lain masih prematur untuk dilaksanakan Eksekusinya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang pada prinsipnya tetap memperkuat keputusan Hakim Judex Factie yaitu pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau. Pertimbangan Hakim tersebut adalah berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diungkapkan oleh para pihak dalam perkara tersebut. Pertimbangan Hakim tersebut yaitu¹ :

Bahwa oleh karena terbukti Kredit Pelawan yang dijamin dengan Hak Tanggungan I telah jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2004 dan ternyata hutangnya tidak dilunasi oleh Pelawan, sedangkan Hak tanggungan yang ke II yang juga dijaminkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 354 juga tidak dibayar sesuai dengan ketentuannya maka dapat dikatakan bahwa Pelawan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sisa hutangnya, sehingga dapat dikatakan sebagai Kredit macet, oleh karena itu cukup alasan bagi Terlawan menyatakan Kredit Pelawan dalam keadaan tak mampu membayar/macet dan dapat dimohonkan eksekusi sesuai aturan Eksekusi Hak Tanggungan walaupun ada yang belum jatuh tempo. Bahwa oleh karena Pelawan terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan membengkaknya hutang Pelawan kepada Terlawan yang akan melebihi jaminan maka cukup alasan bagi Terlawan untuk mengajukan Eksekusi Barang Jaminan Hutang Pelawan yang telah dibebani Hak Tanggungan I dan II sehingga Penetapan Eksekusi Nomor :09/PDT/EK-GROSSE/2004/PN.PBR adalah sah.

Adapun Amar Putusannya adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUDY WENDY SUSANTO, Direktur CV. SELECTA TIRTA RIAU tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/2006

Menurut analisa penulis, meskipun pihak Pemohon Kasasi RUDY WENDYSUSANTO, Direktur CV. SELECTA TIRTA RIAU yang pada ketiga tingkat pemeriksaan Pengadilan terbukti lalai dalam pemenuhan utangnya namun pada prinsipnya terdapat pengecualian pengeksekusian yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, Majelis Hakim tidak memberikan putusan membatalkan eksekusi jaminan yang tidak disebutkan dalam perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/006 tanggal 08 Mei 2002. Hakim memberikan Putusan memberikan sita Jaminan terhadap Jaminan Fidusia yang merupakan Jaminan yang diikat dengan Perjanjian Kredit yang berbeda dengan Perjanjian Pokok, Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah yang tertuang pada Akta Fidusia Nomor 106 tanggal 15 Oktober 2002 yang terhadap Jaminan Fidusia tersebut tetap dijatuhkan eksekusi meskipun belum jatuh tempo. Hakim berpendapat bahwa debitur dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa dalam transaksi kredit antara Pelawan dengan Terlawan terdapat lebih dari satu Perjanjian Kredit sebagaimana yang penulis telah sampaikan pada awal pembahasan bab ini, yaitu dua Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan dua Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia. Adapun Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia yang dimaksud adalah Pinjaman Transaksi Khusus dengan nilai Rp. 300.000.000,- yang jatuh tempo pada 10 Mei 2005 dan Pinjaman Transaksi Khusus I dengan nilai Rp. 500.000.000,- jatuh tempo pada 16 Oktober 2005. Sedangkan Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan untuk melakukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru

pada 3 Agustus 2004 padahal masih ada hutang atau kredit Pelawan yang belum jatuh tempo dan atas permohonan eksekusi tersebut maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan permohonan eksekusi Terlawan dengan Penetapan No : 09/PDT/EK-ROSSE/2004/PN.PBR.

Pada prinsipnya untuk melakukan eksekusi tidak hanya diperlukan adanya ingkar janji dari debitur, tapi diperlukan suatu syarat lain, yaitu utang yang dijamin tersebut sudah dapat ditagih (*opeisbaar*)². Dalam kasus ini, sudah terbukti terdapat Perjanjian Kredit yang diperkuat dengan Perjanjian Kredit lainnya, yaitu Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang dikuatkan oleh Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia yang sepertinya jaminan fidusia tersebut dikesampingkan dalam pemeriksaan di persidangan. Secara hukum, suatu Perjanjian Kredit yang belum jatuh tempo tentu tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi.

Menurut analisa penulis, seharusnya yang boleh diminta pertanggungjawaban hanya sebatas benda jaminan yang disebutkan dalam perjanjian pokok dengan alasan bahwa ketika membuat perjanjian kredit, pihak bank sudah menaksir bahwa benda agunan lebih tinggi nilainya dari jumlah pinjaman yang diberikan. Disamping itu, pembebanan jaminan fidusia merupakan jaminan yang terpisah dengan perjanjian penjaminan lainnya seperti jaminan atas hak tanggungan sebagaimana kasus dalam putusan No. 1883 K/Pdt/2006 yang memberikan sita gabungan dari objek penjaminan yaitu dua buah jaminan atas hak tanggungan dan satu jaminan fidusia milik nasabah bank CIMB Niaga.

² Mariam Badrul Zaman, *Op. Cit.*, h.101

Jaminan Fidusia memang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan demikian halnya dengan Jaminan berupa Hak Tanggungan³ artinya apabila debitur cidera janji maka dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui gugatan ke Pengadilan. Namun menurut argumentasi penulis meskipun Jaminan Fidusia memiliki kesamaan pada prinsipnya dengan Jaminan berupa Hak Tanggungan mestilah diteliti lagi mengenai proses pengeksekusiannya ataupun penetapan eksekusi atas jaminan tersebut, khususnya pada perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 terdapat perbedaan signifikan dalam hal masa jangka waktu berakhirnya atau jatuh tempo perjanjian tersebut, karena pada Jaminan berupa Hak Tanggungan yang telah jatuh tempo dapat dieksekusi, namun berbeda halnya dengan Jaminan Fidusia yang belum Jatuh tempo sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan eksekusi.

B. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 Terhadap Debitur Pemberi Fidusia Pada PT Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Pekanbaru

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan tentunya sudah pasti harus mendapatkan keputusan, supaya perkara tersebut jelas posisi dan kedudukannya. Para pihak dalam sengketa tersebut senantiasa mengemukakan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil yang diajukan di pemeriksaan Pengadilan. Demikian halnya pada perkara dalam Putusan No. 1883 K/Pdt/2006.

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.158-159

Melalui Putusan No. 1883 K/Pdt/2006 Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Kasasi memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Rudy Wendy Susanto, Direktur CV. Selecta Tirta Riau tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Artinya terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung tetap berpendirian yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau yaitu menetapkan sita gabungan atas jaminan-jaminan yang diberikan debitur Rudy Wendy Susanto, Direktur CV. Selecta Tirta Riau.

Jaminan-jaminan tersebut merupakan jaminan terhadap beberapa transaksi pinjaman yang telah dilakukan antara Kreditur Bank CIMB Niaga dan Debitur Rudy Wendy Susanto, Direktur CV. Selecta Tirta Riau antara lain :

1. Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/006 tanggal 08 Mei 2002 dengan pinjaman tetap (*revolving Basis*) sebesar Rp. 700.000.000,- Jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2004 dengan jaminan diberikan Sertifikat Hak Guna Bagunan Nomor 354 a.n. RUDY WENDY SUSANTO yang terletak di Jl. Setiabudi No. 111 Pekanbaru sesuai Grosse Akte Hak Tanggungan Nomor : 1958/2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan Nomor : 145/2003 tanggal 30 Januari 2003.
2. Pinjaman Transaksi Khusus (*On Liquidation Basis*) sebesar Rp. 300.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2005 dengan jaminan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 106 tanggal 15 Oktober 2002

3. Perjanjian Kredit Nomor 047/COMM/023 tanggal 15 Oktober 2002 dengan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus I sebesar Rp. 500.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2005 dengan jaminan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 105 tanggal 15 Oktober 2002.

Akibat hukum Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/2006 adalah dengan terbuktinya pihak debitur sebagai pihak yang cidera janji (wanprestasi) maka dapat disimpulkan bahwa setelah Putusan Pengadilan dijatuhkan maka objek jaminan dapat segera dieksekusi.

Yang menjadi objek jaminan dalam perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/2006 adalah Sertifikat Hak Guna Bagunan Nomor 354 a.n. Rudy Wendy Susanto yang terletak di Jl. Setiabudi No. 111 Pekanbaru sesuai Grosse Akte Hak Tanggungan Nomor : 1958/2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan Nomor : 145/2003 tanggal 30 Januari 2003 dan yang menjadi objek jaminan Fidusia sesuai dengan jaminan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 106 tanggal 15 Oktober 2002 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 105 tanggal 15 Oktober 2002 adalah berupa Mesin-mesin dan alat produksi yang terletak di jalan Setia Budi Nomor 3 Pekanbaru.

Terhadap benda-benda yang dijadikan objek jaminan dalam hal ini Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia berakibat hukum dapat dieksekusi. Eksekusi jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi :

Apabila Debitur Cidera Janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.⁴

Mengenai Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksekusi jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasi kepada penerima fidusia, meskipun telah diberikan somasi.⁵

Ada 4 cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan

⁴ Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁵Salim HS, *Loc.Cit.*

sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan (pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).⁶

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

1. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum (pasal 32)
2. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum (pasal 33).⁷

⁶*Ibid.*

⁷M. Bahsan, *Loc.Cit.*

Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum prossessorium*⁸ adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut pada pemberi fidusia. Demikian pula apabila nilai hasil eksekusi jaminan fidusia tidak mencukupi untuk pemenuhan pembayaran piutang maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

⁸*Constitutum Prossessorium* adalah suatu keadaan dimana benda tetap dikuasai debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/2006 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang pada prinsipnya tetap memperkuat keputusan Hakim Judex Factie yaitu pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Riau. Pertimbangan Hakim tersebut adalah berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diungkapkan oleh para pihak dalam perkara tersebut. Adapun Amar Putusannya adalah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Majelis Hakim memberikan Putusan memberikan sita Jaminan terhadap Jaminan Fidusia yang merupakan Jaminan yang diikat dengan Perjanjian Kredit yang berbeda dengan Perjanjian Pokok, Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah yang tertuang pada Akta Fidusia Nomor 106 tanggal 15 Oktober 2002 yang terhadap Jaminan Fidusia tersebut tetap dijatuhkan eksekusi meskipun belum jatuh tempo. Hakim berpendapat bahwa debitur dinyatakan wanprestasi, secara teori eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia.

2. Mengenai akibat hukum Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/2006 dapat disimpulkan bahwa dengan terbuktinya pihak debitur sebagai pihak yang cidera janji (wanprestasi) maka dapat disimpulkan bahwa setelah Putusan Pengadilan dijatuhkan maka objek jaminan dapat segera dieksekusi. Terhadap benda-benda yang dijadikan objek jaminan dalam hal ini Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia berakibat hukum dapat dieksekusi. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan apabila Debitur Cidera Janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berperkara, hendaknya sebelum sampai ke pengadilan diupayakan untuk melakukan perdamaian, karena perdamaian adalah jalan penyelesaian yang terbaik, sehingga dikemudian hari hubungan baik tersebut dapat terjaga sesuai dengan ajaran agama.
2. Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, tentunya majelis hakim harus benar-benar dapat menilai dan memutuskan menurut ketentuan hukum dan asas keadilan yang nyata dan dapat diterima oleh semua pihak. Bukan putusan yang berdasarkan kepada hal-hal lain yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya hakim harus menilai secara obyektif, dan tidak mau menerima pemberian dalam bentuk apapun dari para pihak yang berperkara.
4. Pihak bank hendaknya mempertimbangkan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Hal ini terjadi karena kemunduran usaha yang dialami oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2004.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mahadi, *Hak Milik Dalam Hukum Perdata Nasional*, Proyek BPHN: 1981.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Jaminan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana persada media group, 2008.
- Rachmadi Usman , *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Perdata*, Bandung: Alumni, 2010.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Trisadini Prasastinah Usanti, *Piutang dalam Perspektif Hukum Jaminan*, diakses dari [http:// aditris.files. wordpress.com/2011/12/ jurnal-piutang-dalam-perspektif-hukum - jaminan fidusia2.doc](http://aditris.files.wordpress.com/2011/12/jurnal-piutang-dalam-perspektif-hukum-jaminan-fidusia2.doc) pada tanggal 12 September 2013.

Sobirin, *Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, diakses dari [http:// eprints. undip. ac.id/ 18238/1/SOBIRIN.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18238/1/SOBIRIN.pdf) pada tanggal 12 September 2013.

Yudhian Amada, *Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek Jaminan* , diakses dari [http:// eprints. upnjatim. ac.id/2973/1/file1.pdf](http://eprints.upnjatim.ac.id/2973/1/file1.pdf) pada 03 Juli 2013.